



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSMAN**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL TERNAK (PAW)**
3. NHK : **1014166**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 77.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA C100 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
6. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.802.432

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 509.802.432



III. HUTANG

Rp. 47.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 462.802.432

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.